

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(CALK)**



**INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Daftar Isi                                                                                          | i   |
| Daftar Tabel                                                                                        | ii  |
| Daftar Lampiran                                                                                     | iii |
| BAB I Pendahuluan                                                                                   | 1   |
| A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan                                                    | 1   |
| B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan                                                       | 6   |
| C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan                                              | 8   |
| BAB II Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD                                        | 10  |
| A. Kebijakan Keuangan                                                                               | 11  |
| B. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD                                                         | 14  |
| BAB III Ikhtisar Capaian Target Kinerja Keuangan                                                    | 17  |
| A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan                                            | 17  |
| B. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan                      | 18  |
| BAB IV Kebijakan Akuntansi                                                                          | 19  |
| A. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah dan Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan | 19  |
| B. Akuntansi Pendapatan                                                                             | 19  |
| C. Akuntansi Belanja                                                                                | 20  |
| D. Akuntansi Beban                                                                                  | 21  |
| E. Pengakuan Aset Tetap dan Kapitalisasi Pengeluaran                                                | 22  |
| BAB V Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan                                                         | 27  |
| A. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran                                                  | 27  |
| B. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional                                                         | 30  |
| C. Penjelasan Pos - Pos Laporan Perubahan Ekuitas                                                   | 36  |
| D. Penjelasan Pos - Pos Neraca                                                                      | 36  |
| BAB VI Pengungkapan Lainnya, Informasi Non Keuangan                                                 | 42  |
| A. Organisasi                                                                                       | 42  |
| B. Kebijakan                                                                                        | 43  |
| C. Struktur Kepegawaian/SDM                                                                         | 45  |
| BAB VII Penutup                                                                                     | 47  |

## DAFTAR TABEL

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1. Realisasi Indikator Kinerja per Sasaran Strategis | 14 |
| Tabel 3.1. Realisasi APBD TA. 2021                           | 17 |
| Tabel 3.2. Realisasi Anggaran Per Program                    | 18 |
| Tabel 5.1. Realisasi Anggaran Per Kelompok dan Jenis Belanja | 27 |
| Tabel 5.2. Perincian Belanja Pegawai                         | 28 |
| Tabel 5.3. Perincian Barang dan Jasa                         | 29 |
| Tabel 5.4. Perincian Belanja Modal                           | 30 |
| Tabel 5.5. Perincian Beban                                   | 31 |
| Tabel 5.6. Perincian Beban Pegawai                           | 31 |
| Tabel 5.7. Perincian Beban Barang & Jasa                     | 32 |
| Tabel 5.8. Perincian Beban Barang                            | 32 |
| Tabel 5.9. Perincian Beban Jasa                              | 33 |
| Tabel 5.10. Perincian Beban Pemeliharaan                     | 34 |
| Tabel 5.11. Perincian Beban Perjalanan Dinas                 | 34 |
| Tabel 5.12. Perincian Beban Penyusutan Peralatan & Mesin     | 35 |
| Tabel 5.13. Perincian Beban Penyusutan Gedung & Bangunan     | 35 |
| Tabel 5.14. Perincian Aset Tetap menurut Jenis               | 37 |
| Tabel 5.15. Perincian Mutasi Aset Tambah                     | 37 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I Berita Acara Stock Opname dan Perhitungan Persediaan
- Lampiran II Data Mutasi dan Penambahan Aset
- Lampiran III Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah
- Lampiran IV Data Utang Belanja Jasa dan Hutang TPP Tahun Anggaran 2021
- Lampiran V Berita Acara Serah Terima Barang Mobil Toyota Avanza dari  
Setda Kabupaten Wonogiri.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

#### **1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (SAP, 2010). Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Wonogiri disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan.

Inspektorat Kabupaten Wonogiri selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

##### **a. Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

##### **b. Manajemen**

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan

fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

c. **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Inspektorat Kabupaten Wonogiri dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

**2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (SAP, 2010).

Pelaporan keuangan Inspektorat Kabupaten Wonogiri menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- d. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.

- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Komponen laporan keuangan Inspektorat Kabupaten Wonogiri terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Operasional
- c. Laporan Perubahan Ekuitas
- d. Neraca
- e. Catatan atas Laporan Keuangan

### **Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara eksekutif dengan legislatif sesuai peraturan perundang-undangan (SAP, 2010). Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit
- e. Pembiayaan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

## **Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan - LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan - LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Laporan Operasional menyediakan informasi :

- a. mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- b. mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c. yang berguna dalam memprediksi pendapatan - LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- d. mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

## **Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit - LO pada periode bersangkutan, Koreksi-Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya atau perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap, serta Ekuitas Akhir.

## **Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu (SAP, 2010). Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah yang diharapkan dapat diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- a. Aset Lancar
- b. Aset Tetap
- c. Aset Lainnya
- d. Kewajiban Jangka Pendek
- e. Kewajiban Jangka Panjang
- f. Ekuitas Dana Lancar
- g. Ekuitas Dana Investasi

## **Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan-penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

## **B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
  10. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengeloaan Barang Milik Daerah;
  11. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  12. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
  14. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 7);
  16. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 74).

## **C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

### **BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

- A. Ekonomi Makro
- B. Kebijakan Keuangan
- C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

### **BAB III IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**

- A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- B. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

### **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- A. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah dan Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- B. Akuntansi Pendapatan
- C. Akuntansi Belanja
- D. Akuntansi Beban
- E. Pengakuan Aset Tetap dan Kapitalisasi Pengeluaran

### **BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.**

- A. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran
- B. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional
- C. Penjelasan Pos - Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- D. Penjelasan Pos - Pos Neraca

## **BAB VI PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN**

- A. Organisasi**
- B. Kebijakan**
- C. Struktur Kepegawaian / SDM**

## **BAB VII PENUTUP**

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

Pengawasan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan strategis dalam manajemen pemerintahan yang perlu dioptimalkan perannya dalam mendukung kelancaran dan ketepatan dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum dan pembangunan guna mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik.

Tujuan pengawasan dimaksudkan sebagai fungsi kontrol agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta sesuai prinsip efisien, efektif dan ekonomis, sebagaimana fungsi manajemen pemerintahan dan pembangunan. Inspektorat Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2021, Inspektorat Kabupaten Wonogiri mendapatkan alokasi dana APBD Perubahan sebesar Rp. 9.265.416.011,00 atau 0,55% dari APBD Perubahan Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 1.673.555.457.430,00. Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2021, pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri meliputi : Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah : 3 laporan terealisasi : 3 laporan (100%), Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan : 1 laporan terealisasi : 1 laporan (100%), Sub Kegiatan Pengawasan Desa : 27 obrik terealisasi : 27 obrik (100%), Sub

Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah : 17 laporan terealisasi 17 laporan (100%), Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu : 92 laporan terealisasi 96 laporan (104,40%), Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi : 5 laporan terealisasi 5 laporan (100%), Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas : 1 laporan terelisasi 1 laporan (100%), Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja : 54 laporan terelisasi 54 laporan (100%), Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi : 1 laporan terelisasi 1 laporan (100%), Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP : 33 laporan terelisasi 33 laporan (100%), Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan : 11 laporan terelisasi 14 laporan (127,30%).

#### **A. Kebijakan Keuangan**

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah telah dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan DPRD Kabupaten Wonogiri tanggal 20 Agustus 2021 Nomor : 20/KSB/2021 dan Nomor : 10/KSB/2021 tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 di jadikan acuan dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2021.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan pada Perubahan KUA Tahun 2021 dalam upaya mengamankan sumber-sumber pendapatan daerah, melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pajak Daerah :
  - a. Peningkatan pelayanan pajak daerah;
  - b. Peningkatan Law Enforcement (Memaksimalkan penagihan pajak)
  - c. Intensifikasi pajak daerah

- d. Ekstensifikasi pajak daerah
  - e. Kebijakan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah.
2. Optimalisasi Retribusi Daerah :
    - b. Peningkatan pelayanan retribusi daerah;
    - c. Peningkatan Law Enforcement (membuat perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan Bank)
    - d. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retriusi Daerah
  2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain -- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
  3. Kebijakan Dana Tranfer
  4. Kebijakan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dengan berpedoman pada prinsip – prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2021 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Dengan mendasarkan pada permasalahan utama pembangunan daerah, serta prioritas utama pembangunan daerah, maka kebijakan belanja daerah pada Perubahan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN, belanja dana desa dan alokasi dana desa dan Alokasi Dana Desa;
- b. Belanja daerah dialokasikan untuk memenuhi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan non pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran;

- c. Fokus pada upaya percepatan pemulihan (recovery) dan penanganan masalah sosial, kemiskinan dan penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak dari pandemic Covid 19;
- d. Fokus pada upaya kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan terhadap bencana terutama dengan selalu memberikan pemahaman berkelanjutan PHBS;
- e. Peningkatan kualitas pembangunan manusia, melalui peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan ;
- f. Pemulihan perekonomian masyarakat terdampak di antaranya pada sektor ketenagakerjaan berbasis pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial termasuk untuk dunia usaha utamanya UMKM dan IKM yang terdampak dengan program program stimulus sesuai kewenangan daerah;
- g. Penyediaan dana belanja tak terduga yang mencukupi untukantisipasi terjadinya bencana dan kejadian lain berdampak besar;
- h. Memenuhi alokasi prosentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 % fungsi pendidikan dan 10 % fungsi kesehatan, sedangkan mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi dan belanja – belanja penunjang lainnya;
- i. Mengkonordinir masukan usulan pembangunan yang dijarah melalui aspirasi masyarakat dalam forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan.

## B. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun 2021

Tabel 2.1.  
Realisasi Indikator Kinerja per Sasaran Strategis

| N O | SASARAN STRATEGIS                                                                  | INDIKATOR KINERJA                                      | TARGET | REALISASI                                | % CAPAIAN | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                    | INDIKATOR KINERJA                                                    | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1.  | Meningkatnya efektivitas SPIP                                                      | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 3      | N/A<br>(belum terbit hasilnya dari BPKP) | N/A       | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI            |                                                                      |        |           |           |
|     |                                                                                    |                                                        |        |                                          |           | Kegiatan pendampingan dan Asistensi                                |                                                                      |        |           |           |
|     |                                                                                    |                                                        |        |                                          |           | Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 3      | 3         | 100%      |
| 2.  | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten | BPK Opini                                              | WTP    | WTP<br>(atas LKPD TA. 2020)              | 100%      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                 |                                                                      |        |           |           |
|     |                                                                                    |                                                        |        |                                          |           | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal                       |                                                                      |        |           |           |
|     |                                                                                    |                                                        |        |                                          |           | Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan                                | Jumlah laporan Reviu Laporan Keuangan                                | 1      | 1         | 100%      |
|     |                                                                                    |                                                        |        |                                          |           | Sub Kegiatan Pengawasan Desa                                       | Jumlah laporan Pengawasan Desa                                       | 27     | 27        | 100%      |
|     |                                                                                    |                                                        |        |                                          |           | Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                  | Jumlah laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                  | 17     | 17        | 100%      |
|     |                                                                                    |                                                        |        |                                          |           | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu         |                                                                      |        |           |           |
|     |                                                                                    |                                                        |        |                                          |           | Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                     | Jumlah laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                     | 92     | 96        | 104%      |
|     |                                                                                    |                                                        |        |                                          |           | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI            |                                                                      |        |           |           |
|     |                                                                                    |                                                        |        |                                          |           | Kegiatan pendampingan dan Asistensi                                |                                                                      |        |           |           |

|    |                                                                     |                                                                                                                      |     |                                                       |      |                                                                                                                      |                                                                                                                        |    |    |      |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
|    |                                                                     |                                                                                                                      |     |                                                       |      | Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi               | Jumlah laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi               | 5  | 5  | 100% |
|    |                                                                     |                                                                                                                      |     |                                                       |      | Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                             | Jumlah laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                             | 1  | 1  | 100% |
|    |                                                                     | Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten                                                                                        | BB  | N/A<br>(hasil AKIP 2021 dari KemenpanRB belum terbit) | N/A  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>                                                                            | <b>Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT</b>                                                                     |    |    |      |
|    |                                                                     |                                                                                                                      |     |                                                       |      | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                         |                                                                                                                        |    |    |      |
|    |                                                                     |                                                                                                                      |     |                                                       |      | Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | Jumlah laporan Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | 54 | 54 | 100% |
|    |                                                                     |                                                                                                                      |     |                                                       |      | <b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>                                                       |                                                                                                                        |    |    |      |
|    |                                                                     |                                                                                                                      |     |                                                       |      | Kegiatan pendampingan dan Asistensi                                                                                  |                                                                                                                        |    |    |      |
|    |                                                                     |                                                                                                                      |     |                                                       |      | Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                  | Jumlah laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                  | 1  | 1  | 100% |
| 3. | Meningkatnya Efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan | Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Fungsional, baik APIP maupun APEP | 90% | 95%                                                   | 106% | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>                                                                            | <b>Persentase realisasi pengawasan sesuai PKPT</b>                                                                     |    |    |      |
|    |                                                                     |                                                                                                                      |     |                                                       |      | Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                         |                                                                                                                        |    |    |      |
|    |                                                                     |                                                                                                                      |     |                                                       |      | Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 33 | 33 | 100% |

|    |                                                                                      |                                                              |         |                                          |     |                                                                                    |                                                                      |      |      |      |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| 4. | Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, dengan Indikator Kinerja | Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) | Level 3 | N/A<br>(belum terbit hasilnya dari BPKP) | N/A | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                            |                                                                      |      |      |      |  |
|    |                                                                                      |                                                              |         |                                          |     | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan |                                                                      |      |      |      |  |
|    |                                                                                      |                                                              |         |                                          |     | Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                       | Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan       | 11   | 14   | 127% |  |
|    |                                                                                      |                                                              |         |                                          |     | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota                        | Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah | 100% | 100% | 100% |  |

### BAB III

#### IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

##### A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Indikator pencapaian target APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.  
Realisasi APBD TA. 2021

| No | APBD       | Anggaran      | Realisasi     | %     | Target | Naik/Turun/<br>Hemat                          |
|----|------------|---------------|---------------|-------|--------|-----------------------------------------------|
| 1  | Pendapatan | -             | -             | -     | -      | -                                             |
| 2  | Belanja    | 9.265.416.011 | 7.212.847.907 | 77,85 | -      | Naik<br>(dibandingkan<br>Capaian TA<br>2020). |

##### Belanja

Belanja Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp 9.265.416.011,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.212.847.907,00 atau 77,85%. Adapun rincian dari belanja tersebut adalah sebagai berikut :

##### 1. Belanja Operasi

Jumlah Pagu Anggaran Belanja Operasi adalah Rp. 9.074.279.647,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.048.320.907,00 atau 77,67 %, yang meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.934.888.750,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.113.432.157,00

##### 2. Belanja Modal

Jumlah Pagu Anggaran Belanja Modal adalah Rp 191.136.364,00 dengan realisasi sebesar Rp 164.527.000,00 atau 86,08 %.

Adapun rincian belanja per program sebagai berikut :

Tabel 3.2.  
Realisasi Anggaran per Program

| No | Uraian Program                                               | Anggaran<br>(Rp) | Realisasi<br>(Rp) | Sisa<br>(Rp)  |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota | 8.589.643.833    | 6.749.391.716     | 1.840.252.117 |
| 2  | Program Penyelenggaraan Pengawasan                           | 350.603.345      | 234.711.126       | 115.892.219   |
| 3  | Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi       | 325.168.833      | 228.745.065       | 96.423.768    |

#### B. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Berdasarkan pada analisa permasalahan yang dilakukan atas keseluruhan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2021 dari sisi sistem dan prosedur administrasi keuangan, maka dapat dirumuskan hambatan dan kendala yang dihadapi sebagai berikut :

1. Adanya pandemi Covid-19 yang berkelanjutan, berdampak pada semua sektor termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga kegiatan pengawasan tidak bisa berjalan secara optimal;
2. Adanya perubahan regulasi / peraturan yang berdampak pada serapan anggaran kurang optimal ( Perjalanan Dinas Dalam Kota hanya berupa BBM saja);
3. Terdapat 2 (dua) orang Auditor dan 2 (dua) Pejabat Eselon III yang memasuki pensiun pada Tahun 2021, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan;
4. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Pengawasan yang ada pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **A. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah dan Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintahan Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan Keuangan. Sebagai entitas pelaporan adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri. Sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri disajikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2014 dan Perubahannya Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual. Namun dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

#### **B. Akuntansi Pendapatan**

##### **1. Pendapatan LRA**

Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah, diterima oleh SKPD, atau diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD.

Akuntansi Pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

## 2. Pendapatan LO

Pendapatan LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional, dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah.

Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable).

## C. Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah Khusus untuk belanja melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran.

Pengukuran belanja berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

#### **D. Akuntansi Beban**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contoh : tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

#### **Pengakuan beban pada SKPD :**

##### **1. Beban Pegawai**

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU diakui ketika bukti

pembayaran beban (misal : bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

## 2. Beban Barang/Jasa

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

## 3. Pengakuan Beban

- a. Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- b. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

## E. Pengakuan Aset Tetap dan Kapitalisasi Pengeluaran

Pengakuan aset dan kapitalisasi pengeluaran yang diterapkan mengacu pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri, dengan kebijakan sebagai berikut :

### 1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Wonogiri/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap

dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD), saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas.

#### 5. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan atau hak Pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang diakui pada saat :

- a. Diterbitkannya surat ketetapan;
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;  
atau
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

#### 6. Persediaan

Persediaan adalah barang yang dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

**Pencatatan persediaan dilakukan dengan :**

- a. Metode Perpetual, digunakan untuk jenis persediaan obat - obatan, yang bersifat **continues** dan membutuhkan kontrol yang besar;
- b. Metode Periodik, digunakan untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, diantaranya Alat Tulis Kantor (ATK).

**Penilaian Persediaan :**

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (First In First Out), harga pokok dari barang –barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang

digunakan pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dari harga pembelian terakhir.

#### 7. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran Kas dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

#### 8. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Aktiva Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aktiva lainnya.

#### 9. Penilaian Aset Tetap

Aset Tetap yang diperoleh bukan dinilai berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

#### 10. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, Konstruksi Dalam Pengerjaan

(KDP) dan dana cadangan. Aset Lainnya meliputi aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, kas yang dibatasi penggunaannya, dan aset lain - lain.

#### 11. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Hutang jangka pendek terdiri dari :

- a. Kewajiban Jangka Pendek PPKD : Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Beban dan Utang Jangka Pendek Lainnya;
- b. Kewajiban Jangka Pendek di SKPD : Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Beban dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

#### 12. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang jika diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang hanya terdapat di PPKD terdiri dari Hutang Dalam Negeri, Hutang Luar Negeri dan Hutang Jangka Panjang lainnya.

#### 13. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah Kewajiban Pemerintah pada tanggal pelaporan.

Ekuitas terdiri dari :

- a. Ekuitas Sisa SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan

Pembiayaan Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit LRA.

b. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran (R/K) PPKD.

## BAB V

### PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

#### A. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran

##### 1. Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2021 Inspektorat Kabupaten Wonogiri tidak mempunyai pendapatan.

##### 2. Belanja

Pada Tahun Anggaran 2021 jumlah total realisasi belanja Inspektorat Kabupaten Wonogiri adalah Rp 7.212.847.907,00 atau 77,85 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.265.416.011,00, dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 6.691.555.162,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 521.292.742,00 .

Rincian realisasi belanja periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021 disajikan dalam table berikut :

Tabel 5.1.  
Realisasi Anggaran per Kelompok dan Jenis Belanja

| Kode Rek. | Uraian                   | Pagu Anggaran    | Realisasi        | %     | Realisasi 2020   |
|-----------|--------------------------|------------------|------------------|-------|------------------|
| 5.        | Belanja terdiri :        | 9.265.416.011,00 | 7.212847.907,00  | 77,85 | 6.691.555.162,00 |
| 5.1.      | Belanja Operasi          | 9.074.279.647,00 | 7.048.320.907,00 | 77,67 | 6.691.555.162,00 |
| 5.1.01    | a. Belanja Pegawai       | 7.653.788.360,00 | 5.934.888.750,00 | 77,54 | 5.813.866.528,00 |
| 5.1.02    | b. Belanja Barang & Jasa | 1.420.491.287,00 | 1.113.432.157,00 | 78,38 | 1.877.688.634,00 |
| 5.2       | Belanja Modal            | 191.136.364,00   | 164.527.000,00   | -     | -                |
|           | J U M L A H              | 9.265.416.011,00 | 7.212847.907,00  | 77,85 | 6.691.555.162,00 |

2.1. Belanja Operasi :

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 7.048.320.907,00 atau 77,67 % dari pagu anggaran sebesar Rp 9.074.279.647,00 meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp 5.934.888.750,00 dan Belanja Barang & Jasa sebesar Rp 1.113.432.157,00.

Realisasi belanja operasi berdasarkan obyek, diuraikan sebagai berikut :

2.1.1. Belanja Pegawai :

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 5.934.888.750,00 atau 77,54 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.653.788.360,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 Rp. 5.813.866.528,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 121.022.222,00.

Realisasi belanja pegawai periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.2.  
Perincian Belanja Pegawai

| Kode Rek. | Obyek Belanja                    | Pagu Anggaran | Realisasi 2021 | %     | Realisasi 2020 |
|-----------|----------------------------------|---------------|----------------|-------|----------------|
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji & Tunjangan ASN     | 4.451.179.177 | 3.519.630.150  | 79,07 | 3.414.041.732  |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 3.202.609.183 | 2.415.258.600  | 75,42 | 2.379.856.050  |
|           | J U M L A H                      | 7.653.788.360 | 5.934.888.750  | 77,54 | 5.813.866.528  |

2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi sebesar Rp 1.113.432.157,00 atau 78,38 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.420.491.287,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 877.688.634,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 235.743.523,00.

Realisasi belanja Barang dan Jasa periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.3.  
Perincian Barang dan Jasa

| Kode Rek     | Obyek Belanja                                                                         | Pagu Anggaran    | Realisasi 2021   | %     | Realisasi 2020 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|----------------|
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis                                                            | 395.557.553,00   | 312.347.653,00   | 78,96 | 248.077.192,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor                                                                   | 365.400.000,00   | 280.728.394,00   | 76,83 | 227.477.506,00 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan / Asuransi                                                      | 5.606.640,00     | -                | -     | -              |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                      | 3500.000,00      | -                | -     | -              |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan & Pelatihan | 118.450.000,00   | 97.830.000,00    | 82,59 | 13.301.490,00  |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan & Mesin                                                | 113.384.800,00   | 106.120.369,00   | 93,59 | 23.989.000,00  |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung & Bangunan                                                | 8.108.000,00     | 7.871.500,00     | 97,08 | 14.670.500,00  |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                 | 410.484.294,00   | 308.534.241,00   | 75,16 | 350.172.946,00 |
| J U M L A H  |                                                                                       | 1.420.491.287,00 | 1.113.432.157,00 | 78,38 | 877.688.634,00 |

## 2.2. Belanja Modal :

Pada Tahun Anggaran 2021 realisasi belanja modal sebesar Rp. 164.527.000,00 atau 86,08 % dari pagu anggaran Rp. 191.136.364,00 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp. 0,00 disebabkan Tahun Anggaran 2020 tidak ada anggaran untuk belanja modal, mengalami kenaikan sebesar Rp. 164.527.000,00

Adapun Realisasi belanja modal periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.4.  
Perincian Belanja Modal

| Kode Rek    | Obyek Belanja                           | Pagu Anggaran  | Realisasi 2021 | %     | Realisasi 2020 |
|-------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| 5.2.01      | Belanja Modal Tanah                     | -              | -              | -     | -              |
| 5.2.02.     | Belanja Modal Peralatan                 | 191.136.364,00 | 164.527.000,00 | 86,08 | -              |
| 5.2.03      | Belanja Modal Gedung & Bangunan         | -              | -              | -     | -              |
| 5.2.04      | Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan | -              | -              | -     | -              |
| 5.2.05      | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya        | -              | -              | -     | -              |
| 5.2.06      | Belanja Aset Lainnya                    | -              | -              | -     | -              |
| J U M L A H |                                         | 191.136.364,00 | 164.527.000,00 | 86,08 | -              |

#### B. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional

Jumlah Beban Operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 7.048.320.907,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 6.825.934.738,31 mengalami kenaikan Rp. 222.386.168,69 atau 1,03 % .

Realisasi beban operasi pada tahun 2021 disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.5.  
Perincian Beban

| Kode Rek | Uraian                             | Realisasi 2021   | Realisasi 2020   | Naik / Turun    | %    |
|----------|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------|
| 8.1      | Beban Operasi                      | 7.043.288.931,00 | 6.697.926.720,00 | 345.362.211,00  | 1,05 |
| 8.1.01   | Beban Pegawai                      | 5.926.353.562,00 | 5.823.660.528,00 | 102.693.034,00  | 1,02 |
| 8.1.02   | Beban Barang & Jasa                | 1.116.935.369,00 | 874.266.192,00   | 242.669.177,00  | 1,28 |
| 8.2      | Beban Penyusutan & Amortisasi      | 105.974.818,33   | 128.008.018,31   | -22.033.200,02  | 0,83 |
| 8.2.01   | Beban Penyusutan Peralatan & Mesin | 95.411.959,21    | 117.445.156,14   | - 22.033.197,07 | 0,85 |
| 8.2.02   | Beban Penyusutan Gedung & Bangunan | 10.562.859,12    | 10.562.862,17    | - 3,05          | 1,00 |
| 1        | J U M L A H                        | 7.149.263.749,33 | 6.825.934.738,31 | 323.329.011,02  | 1,05 |

. Beban Operasi

Beban Operasi pada Tahun 2021 sebesar Rp. 7.043.288.931,00 dengan rincian sebagai berikut :

8.1.01 Beban Pegawai periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021 sebesar Rp 5.926.363.562,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 5.823.660.528,00 mengalami kenaikan Rp. 102.693.034,00 atau 1,02 %, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5.6.  
Perincian Beban Pegawai

| Kode Rek  | Uraian                         | Realisasi 2021   | Realisasi 2020   |
|-----------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 8.1.01.01 | Beban Gaji dan Tunjangan ASN   | 3.518.848.062,00 | 3.441.340.828,00 |
| 8.1.01.02 | Beban Tambahan Penghasilan ASN | 2.407.505.500,00 | 2.382.319.700,00 |
|           | J U M L A H                    | 5.926.353.562,00 | 5.823.660.528,00 |

8.1.02. Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.116.935.369,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 874.266.192,00 mengalami kenaikan Rp. 242.669.177,00 atau 1,28 %, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5.7.  
Perincian Beban Barang dan Jasa

| Kode Rek. | Uraian                 | Realisasi 2021   | Realisasi 2020 |
|-----------|------------------------|------------------|----------------|
| 8.1.02.01 | Beban Barang           | 315.477.678,00   | 244.874.767,00 |
| 8.1.02.02 | Beban Jasa             | 378.931.581,00   | 240.558.979,00 |
| 8.1.02.03 | Beban Pemeliharaan     | 113.991.869,00   | 38.659.500,00  |
| 8.1.02.04 | Beban Perjalanan Dinas | 308.534.241,00   | 350.172.946,00 |
|           | J U M L A H            | 1.116.935.369,00 | 874.266.192,00 |

8.1.02.01. Beban Barang periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021 sebesar Rp. 315.477.678,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 244.874.767,00 mengalami kenaikan Rp. 70.602.911,00 atau 1,29 %, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5.8.  
Perincian Beban Barang

| Kode Rek.      | Uraian                                               | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 |
|----------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 8.1.02.01.0004 | Beban Bahan Bakar & Pelumas                          | 29.201.633,00  | 38.544.542,00  |
| 8.1.02.01.0009 | Beban Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran             | 360.000,00     | 450.000,00     |
| 8.1.02.01.0010 | Beban Bahan Tabung Gas                               | 890.000,00     | 730.000,00     |
| 8.1.02.01.0012 | Beban Bahan – Bahan Lainnya                          | 423.500,00     | 0,00           |
| 8.1.02.01.0013 | Beban Suku Cadang Alat Angkutan                      | -              | 30.201.000,00  |
| 8.1.02.01.0024 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan ATK                  | 33.576.575,00  | 54.802.125,00  |
| 8.1.02.01.0026 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak | 51.770.750,00  | 41.771.450,00  |

|                |                                                                      |                       |                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8.1.02.01.0027 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos                   | 3.492.000,00          | 1500.000,00           |
| 8.1.02.01.0029 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor                               | 30.818.500,00         | -                     |
| 8.1.02.01.0030 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor              | 1.133.800,00          | 2.573.150,00          |
| 8.1.02.01.0031 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Listrik                | 3.929.270,00          | 4.000.000,00          |
| 8.1.02.01.0032 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perlengkapan Dinas          | -                     | 10.087.500,00         |
| 8.1.02.01.0036 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 45.581.500,00         | -                     |
| 8.1.02.01.0052 | Beban Makanan dan Minuman Rapat                                      | 98.253.400,00         | 58.552.000,00         |
| 8.1.02.01.0053 | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                | 16.046.750,00         | 1.663.000,00          |
|                | <b>J U M L A H</b>                                                   | <b>315.477.678,00</b> | <b>244.874.767,00</b> |

8.1.02.02. **Beban Jasa** Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021 sebesar Rp. 378.931.581,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 240.558.979,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 138.372.602,00 atau 1,24%. Adapun perincian **Beban Jasa** adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.9.**  
**Perincian Beban Jasa**

| <b>Kode Rek.</b> | <b>Uraian</b>                                                             | <b>Realisasi 2021</b> | <b>Realisasi 2020</b> |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8.1.02.02.01     | Beban Jasa Kantor                                                         | 281.101.581,00        | 227.257.489,00        |
| 8.1.02.02.12     | Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, BinteK, serta Pendidikan & Pelatihan | 97.830.000,00         | 13.301.490,00         |
|                  | <b>J U M L A H</b>                                                        | <b>378.931.581</b>    | <b>240.558.979,00</b> |

8.1.02.03 **Beban Pemeliharaan** Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021 sebesar Rp. 113.991.869,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 38.659.500,00 mengalami kenaikan

Rp. 75.332.369,00 atau 2,95 %. Adapun perincian Beban Pemeliharaan Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.10.

Perincian Beban Pemeliharaan

| Kode Rek.    | Uraian                               | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 |
|--------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 8.1.02.03.02 | Beban Pemeliharaan Peralatan & Mesin | 106.120.369,00 | 23.989.000,00  |
| 8.1.02.03.03 | Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan | 7.871.500,00   | 14.670.500,00  |
|              | J U M L A H                          | 113.991.869,00 | 38.659.500,00  |

8.1.02.04. Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021 sebesar Rp. 308.534.241,00 sedangkan untuk realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 350.172.946,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 41.638.705,00 atau 0,88 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.11.

Perincian Beban Perjalanan Dinas

| Kode Rek.         | Uraian                            | Realisasi 2021 | Realisasi 2020 |
|-------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa      | 291.398.955,00 | 89.265.957,00  |
| 8.1.02.04.01.0003 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 17.135.286,00  | 260.906.989,00 |
|                   | J U M L A H                       | 308.534.241,00 | 350.172.946,00 |

8.2. Beban Penyusutan dan Amortisasi, terdiri dari :

8.2.01. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021 sebesar Rp. 95.411.959,21 sedangkan untuk realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 117.445.156,14 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 22.033.197,00 atau 0,81 %, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.12.**  
**Perincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin**

| <b>Kode Rek.</b> | <b>Uraian</b>                                         | <b>Realisasi 2021</b> | <b>Realisasi 2020</b> |
|------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8.2.01.02        | Beban Penyusutan Alat Angkutan                        | 21.562.754,21         | 44.866.651,14         |
| 8.2.01.05        | Beban Penyusutan Alat Kantor & Rumah Tangga           | 21.352.555,00         | 18.809.105,00         |
| 8.2.01.06        | Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar | 10.018.650,00         | 11.280.400,00         |
| 8.2.01.07        | Beban Penyusutan Alat kedokteran dan Kesehatan        | 196.000,00            | 98.000,00             |
| 8.2.01.10        | Beban Penyusutan Komputer                             | 42.282.000,00         | 42.391.000,00         |
|                  | <b>J U M L A H</b>                                    | <b>95.411.959,21</b>  | <b>117.445.156,14</b> |

8.2.02. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 1 Januari s/d 31 Desember 2021 sebesar Rp. 10.562.859,12 , sedangkan untuk realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 10.562.862,17 atau mengalami penurunan sebesar Rp.3.05,00 atau 1,00 %, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.13.**  
**Perincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan**

| <b>Kode Rek.</b> | <b>Uraian</b>                    | <b>Realisasi 2021</b> | <b>Realisasi 2020</b> |
|------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8.2.02.01        | Beban Penyusutan Bangunan Gedung | 10.562.859,12         | 10.562.862,17         |
|                  | <b>J U M L A H</b>               | <b>10.562.859,12</b>  | <b>10.562.862,17</b>  |

**C. Penjelasan Pos - Pos Laporan Perubahan Ekuitas**

Ekuitas awal pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp 92.550.283,55 berasal dari nilai ekuitas akhir tahun 2020, RK PPKD sebesar Rp 7.212.847.907,00 merupakan realisasi belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Tahun 2021 dan Aset Antar OPD sebesar Rp. 837.787.302,57 merupakan Koreksi Tanah (kurang catat karena baru bersertifikat pada Tanggal : 24 September 2020) senilai Rp. 779.922.000,00 dan Koreksi Peralatan Mesin ( terima Mobil Avanza dari Setda , dengan harga perolehan sebesar Rp. 202.528.559,00 dikurangi akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Rp. 144.663.256,43) senilai Rp. 57.865.302,57 . Adapun untuk Ekuitas Akhir Tahun 2021 sebesar Rp. 993.921.743,79.

**D. Penjelasan Pos - Pos Neraca**

**1. Aset**

Berdasarkan pada perhitungan aset tahun 2021 baik terhadap aset lancar, aset tetap maupun aset lainnya, maka dapat dijelaskan posisi aset Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 sebagai berikut :

**a. Aset Lancar**

Jumlah dari aset lancar adalah Rp 2.465.900,00 yang merupakan sisa dari persediaan alat tulis kantor sebesar Rp 2.465.900,00.

**b. Aset Tetap**

Jumlah nilai buku aset tetap adalah Rp. 1.191.086.558,79 untuk rincian aset tetap disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 5.14.**  
**Perincian Aset Tetap menurut Jenis**

| No. | Uraian                      | 2021                    | 2020                  | Naik / Turun   |
|-----|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| 1   | Tanah                       | 779.922.000,00          | 0,00                  | 779.922.000,00 |
| 2   | Peralatan & Mesin           | 2.030.774.059,00        | 1.742.218.500,00      | 288.555.559,00 |
| 3   | Gedung & Bangunan           | 492.223.350,00          | 492.223.350,00        | 0              |
| 4   | Jalan, Irigasi & Jaringan   | 0,00                    | 0,00                  | 0              |
| 5   | Aset Tetap Lainnya          | 53.978.345,00           | 53.978.345,00         | 0              |
| 6   | Konstruksi dalam Pengerjaan | 0,00                    | 0,00                  | 0              |
| 7   | Akumulasi Penyusutan        | (2.165.811.195,21)      | (1.993.673.120,45)    | 0              |
|     | <b>JUMLAH ASET TETAP</b>    | <b>1.191.086.558,79</b> | <b>294.747.074,55</b> |                |

Mutasi aset tetap tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

**1. Mutasi Tambah :**

Mutasi tambah aset tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 5.15.**  
**Perincian Mutasi Aset Tambah**

| No. | Uraian                                                                          | 2021                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Tanah                                                                           | 779.922.000,00          |
| 2.  | Belanja Modal Murni                                                             | 164.527.000,00          |
| 3.  | Mutasi dari Satker Lain<br>(Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan / Toyota Avans) | 202.528.559,00,00       |
|     | <b>J U M L A H</b>                                                              | <b>1.146.977.559,00</b> |

**2. Mutasi Kurang**

Pada Tahun 2021 terdapat mutasi kurang aset tetap Alat Angkutan senilai Rp. 78.500.000,00 karena ada pengembalian kendaraan dinas ke Sekda selaku Pengguna Barang.

Rincian aset tetap berdasarkan klasifikasi per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

- 1). Tanah untuk Bangunan Kantor Inspektorat Kabupaten Wonogiri seluas 1.111 meter persegi dengan Nomor Sertifikat : HP. 122 Tertanggal 24 September 2020 dengan status Hak Pakai dan merupakan Tanah Negara senilai Rp. 779.922.000,00
- 2). Nilai Buku Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 senilai Rp 254.869.764,79 terdiri dari :

- a) Nilai Buku Alat - Alat Angkutan senilai Rp 54.043.619,79 dengan rincian sebagai berikut :

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Saldo awal Januari 2021                   | 1.176.116.558,00       |
| Penambahan Tahun 2021                     | 202.528.559,00 +       |
|                                           | <hr/> 1.378.645.117,00 |
| Pengurangan mutasi ke Pengelola Barang    |                        |
| Kendaraan Tahun 2021                      | 78.500.000,00 -        |
| Jumlah Alat - Alat Angkutan               | <hr/> 1.300.145.117,00 |
| Akumulasi Penyusutan Alat - Alat Angkutan | 1.246.101.497,21 -     |
|                                           | <hr/>                  |
| Nilai Buku per 31 Desember 2021           | 54.043.619,79          |

- b) Nilai Buku Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp. 72.564.007,50 dengan rincian sebagai berikut :

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Saldo awal Januari 2020                | 204.635.287,00       |
| Penambahan Tahun 2020                  | 63.360.000,00 +      |
|                                        | <hr/> 267.995.287,00 |
| Pengurangan Tahun 2021                 | 0,00 -               |
|                                        | <hr/>                |
| Jumlah Alat Rumah Tangga               | 267.995.287,00       |
| Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga | 195.431.279,50 -     |
|                                        | <hr/>                |
| Nilai Buku per 31 Desember 2021        | 72.564.007,50        |

c). Nilai Buku Alat - Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar senilai

Rp 5.296.262,50 dengan rincian sebagai berikut :

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Saldo awal Tahun 2021                                   | 64.596.100,00       |
| Penambahan Tahun 2021                                   | 825.000,00 +        |
|                                                         | <hr/> 65.421.100,00 |
| Pengurangan Tahun 2021                                  | 0,00 –              |
|                                                         | <hr/>               |
| Jumlah Alat – Alat Studio, Komunikasi & Pemancar        | 65.421.100,00       |
| Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi & Pemancar | 60.124.837,50 –     |
|                                                         | <hr/>               |
| Nilai Buku per 31 Desember 2021                         | 5.296.262,50        |

d). Nilai Buku Alat Kedokteran dan Kesehatan senilai

Rp. 686.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Saldo awal Januari 2021                          | 980.000,00       |
| Penambahan Tahun 2021                            | 0,00 +           |
|                                                  | <hr/> 980.000,00 |
| Pengurangan Tahun 2021                           | 0,00 -           |
|                                                  | <hr/>            |
| Jumlah Alat Kedokteran & Kesehatan               | 980.000,00       |
| Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran & Kesehatan | 294.000,00       |
|                                                  | <hr/>            |
| Nilai Buku per 31 Desember 2021                  | 686.000,00       |

e). Nilai Buku Komputer senilai Rp 122.279.875,00 dengan rincian sebagai berikut :

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Saldo awal Januari 2021         | 295.890.555,00       |
| Penambahan Tahun 2021           | 100.342.000,00 +     |
|                                 | <hr/> 396.232.555,00 |
| Pengurangan Tahun 2021          | 0,00 -               |
|                                 | <hr/>                |
| Jumlah Komputer                 | 396.232.555,00       |
| Akumulasi Penyusutan Komputer   | 273.952.680,00 -     |
|                                 | <hr/>                |
| Nilai Buku per 31 Desember 2021 | 122.279.875,00       |

- 3). Nilai Buku Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 senilai Rp 102.316.449,00 dengan rincian sebagai berikut :

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Saldo awal Januari 2021                  | 492.223.350,00   |
| Penambahan Tahun 2021                    | 0,00 +           |
| Pengurangan Tahun 2021                   | 0,00 -           |
| Jumlah Gedung dan Bangunan               | 492.223.350,00   |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | 389.906.901,00 - |
| Nilai Buku per 31 Desember 2021          | 102.316.449,00   |

- 4). Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan Tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Wonogiri tidak memiliki atau senilai Rp. 0,00.

- 5). Nilai Buku Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021 senilai Rp 53.978.345,00 terdiri dari :

Bahan Perpustakaan senilai Rp 53.978.345,00 dengan rincian sebagai berikut :

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Saldo awal Januari 2021                    | 53.978.345,00 |
| Penambahan Tahun 2021                      | 0,00 +        |
| Pengurangan Tahun 2021                     | 0,00 -        |
| Jumlah Buku dan Perpustakaan               | 53.978.345,00 |
| Akumulasi Penyusutan Buku dan Perpustakaan | 0,00 -        |
| Nilai Buku per 31 Desember 2021            | 53.978.345,00 |

- 6). Konstruksi dalam Pengerjaan sampai dengan Tahun 2021, Inspektorat Kabupaten Wonogiri tidak memiliki atau senilai Rp. 0,00.
- 7). Sampai dengan Tahun 2021, Inspektorat Kabupaten Wonogiri tidak memiliki Aset Lainnya atau senilai Rp. 0,00.

- 8). Selain yang tercatat sebagai asset Intra Countable terdapat sejumlah barang yang tercatat sebagai asset Extra Countable senilai Rp. 5.302.350,00

## 2. Kewajiban

Sampai dengan 31 Desember 2021 Inspektorat Kabupaten Wonogiri mempunyai kewajiban sebesar Rp 199.630.715,00 yang berupa hutang belanja Pegawai pada Bulan Desember 2021 sebesar Rp. 196.706.012,00 terdiri dari hutang iuran asuransi kesehatan / BPJS Kesehatan sebesar Rp. 6.548.262,00 dan hutang belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 190.157.750,00 serta hutang belanja jasa bulan Desember 2021 sebesar Rp. 2.924.703,00, dengan rincian sebagai berikut :

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Hutang Jasa Telepon  | Rp. 92.459,00         |
| Hutang Jasa Air      | Rp. 53.000,00         |
| Hutang Jasa Listrik  | Rp. 2.369.744,00      |
| Hutang Jasa Internet | <u>Rp. 409.500,00</u> |
| J U M L A H          | Rp. 2.924.703,00      |

## 3. Ekuitas Dana

Sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Perubahan Ekuitas, jumlah Ekuitas Akhir per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp 993.921.743,79 dengan rincian sebagai berikut :

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Ekuitas Awal (2020)  | Rp. 92.550.283,55         |
| RK PPKD              | Rp. 7.212.847.907,00      |
| Surplus/Defisit - LO | Rp. (7.149.263.749,33)    |
| Aset Antar OPD       | <u>Rp. 837.787.302,57</u> |
| J U M L A H          | Rp. 993.921.743,79        |

## **BAB VI**

### **PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **A. Organisasi**

Inspektorat Kabupaten Wonogiri merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri serta Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, berdomisili di Jalan Pemuda I Nomor 55 Wonogiri.

Inspektorat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Inspektur
2. Sekretaris, terdiri dari :
  - a. Subbagian Perencanaan
  - b. Subbagian Keuangan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan
4. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan
5. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat
6. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah

Sebagai lembaga teknis daerah Inspektorat mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri, yaitu :

1. Tugas pokok Inspektorat adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

## 2. Fungsi Inspektorat :

- a. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- b. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis administrasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- f. Pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## B. Kebijakan

Untuk memperlancar pelaksanaan Tupoksi tersebut diatas, setiap tahun Inspektorat Kabupaten Wonogiri menetapkan Kebijakan Pengawasan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Wonogiri. Untuk tahun 2021 ditetapkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021.

Dalam Peraturan Bupati tersebut, kegiatan yang dilakukan Inspektorat selama Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Kegiatan pengawasan meliputi :

1. Audit Kinerja terhadap program / kegiatan yang tercantum dalam RPJMD dan atau RKPD dengan sasaran program / kegiatan yang memiliki resiko tinggi;
2. Audit dengan tujuan tertentu, yaitu : meliputi audit investigatif, perhitungan kerugian keuangan negara, opnam kas dan audit dengan tujuan tertentu lainnya berdasar penugasan;
3. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku meliputi :
  - a. Kinerja Rutin Pengawasan terdiri dari : Reviu RPJMD dan Renstra PD, Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan, Reviu laporan keuangan pemerintah daerah, Reviu dan evaluasi laporan kinerja, Reviu LPPD, Reviu DAK Fisik, Evaluasi SPIP, Monitoring penyerapan anggaran / pemeriksaan kas, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaksanaan Wasdalpeg.
  - b. Pengawasan Prioritas Nasional terdiri dari : Tindak lanjut perjanjian kerja sama APIP dan APH, Operasionalisasi Saber Pungli, Pengawasan perencanaan dan penganggaran berbasis gender, Pengawasan dana desa/keuangan desa, Pengawasan BOS.
4. Pengawasan Reformasi Birokrasi meliputi :
  - a. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
  - b. Asistensi/pengawasan pembangunan reformasi birokrasi yang meliputi : SPIP, Kapabilitas APIP, Pelaksanaan LHKPN/LHKASN, Penilaian Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, Penanganan benturan kepentingan, penanganan laporan pengaduan dan penanganan pengaduan masyarakat.

5. Penegakan integritas dan koordinasi pencegahan korupsi meliputi :  
Pelaksanaan SPI, Monitoring dan Evaluasi aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh KPK;
6. Peningkatan Kapabilitas APIP meliputi : Penerapan manajemen resiko, Perencanaan pengawasan berbasis resiko, Audit kinerja, Audit Investigasi, Pengawasan DAK Fisik, Pendidikan berjenjang jabatan fungsional Auditor, P2UPD dan Auditor Kepegawaian serta pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.
7. Pengawasan Lainnya meliputi :
  - a. Audit kepatuhan Pelayanan Perijinan dan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - b. Probity Audit;
  - c. Reviu atas Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - d. Reviu Standar Satuan Harga (SSH) / ANALISA Standar Biaya (ASB);
  - e. Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda).

### **C. Struktur Kepegawaian / SDM**

Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 sebanyak 42 orang, terdiri :

1. Berdasar Jenjang Pendidikan :
  - a. Pasca Sarjana (S2) : 16 orang
  - b. Sarjana : 23 orang
  - c. Sarjana Muda/Diploma : 3 orang
  - d. SLTA : -
  - e. SLTP : -
  - f. SD : -
2. Berdasar Golongan :
  - a. Golongan IV : 20 orang

- b. Golongan III : 22 orang
  - c. Golongan II : -
  - d. Golongan I : -
- 3. Berdasar Jabatan :
  - a. Pejabat Struktural 7 orang, terdiri dari :
    - 1) Eselon II : 1 orang
    - 2) Eselon III : 4 orang
    - 3) Eselon IV : 2 orang
  - b. Pejabat Fungsional Auditor 21 orang, terdiri dari :
    - 1) Auditor Utama : 1 orang
    - 2) Auditor Madya : 6 orang
    - 3) Auditor Muda : 4 orang
    - 4) Auditor Pertama : 5 orang
    - 5) Auditor Penyelia : -
    - 6) Auditor Pelaksana Lanjutan : 2 orang
    - 7) Auditor Pelaksana : -
    - 8) Auditor Kepegawaian Madya: 3 orang
  - c. Pejabat Fungsional P2UPD Madya : 3 orang
  - d. Pejabat Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan : 2 orang
  - e. Pejabat Pranata Komputer Pertama : 1 orang
  - f. Pejabat Fungsional Umum : 7 orang;
  - g. Pejabat Fungsional Perencana Muda : 1 Orang.
- 4. Data Pegawai menurut jenis kelamin :
  - a. Jumlah pegawai laki-laki : 21 orang
  - b. Jumlah pegawai perempuan : 21 orang
- 5. Jumlah Pegawai Kontrak Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 sebanyak 10 orang.

## BAB VII

### PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Inspektorat Kabupaten Wonogiri merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2021 yang penyusunannya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Catatan atas Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna. Masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas keuangan Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kita lakukan.

Wonogiri, 25 Pebruari 2022

INSPEKTUR  
KABUPATEN WONOGIRI  
**MARDIANTO, S.E.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710124 199903 1 002

